

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PEKANBARU**

---

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN KOTA PEKANBARU DALAM  
MENANGGULANGI KEBAKARAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**DISUSUN OLEH :**

**RAHMAT HIDAYAT  
NPM : 117310548**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU TAHUN**

**2017**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Rahmat Hidayat  
NPM : 117310548  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S1 )  
Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Badan Penanggulangan  
Bencana Dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru  
Dalam Menanggulangi Kebakaran.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru, 23 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si.

  
Khotami S.Sos, M.Si.

Turut Menyetujui :  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
Budi Mulianto, S.IP., M.Si.

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**


Nama : Rahmat Hidayat  
NPM : 117310548  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S1 )  
Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Badan Penanggulangan  
Bencana Dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru  
Dalam Menanggulangi Kebakaran.

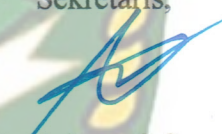
Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 18 Agustus 2017

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

  
Andriyus, S.Sos., M.Si.

Anggota,

  
Maulidiah, S.Sos., M.Si.

Anggota,

Mengetahui  
Pembantu Dekan I,

  
Dr. H. Momo Adidi Yogia, M.Si.

Anggota,

  
H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

  
Khotami, S.Sos., M.Si.

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

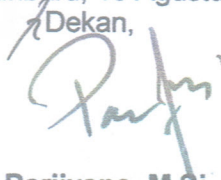
**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 593/UIR-Fs/Kpts/2017 tanggal 16 Agustus 2017 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Jum'at tanggal, 18 Agustus 2017 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rahmat Hidayat  
 NPM : 117310548  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
 Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Kebakaran.  
 Nilai Ujian : Angka : " 74,3 " ; Huruf : " B "  
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Khotami, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 18 Agustus 2017  
 Dekan,



**Drs. Parjiyana, M.Si.**  
 Kuasa Dekan No.469/A-UIR/5-FS/2017

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Rahmat Hidayat  
NPM : 117310548  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S1 )  
Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Badan Penanggulangan  
Bencana Dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru  
Dalam Menanggulangi Kebakaran.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 23 Maret 2017  
An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

  
Andriyus, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

  
Budi Muliando, S.IP., M.Si.

***EVALUATION OF FINANCIAL ASSIGNMENT ASSESSMENT OF FIRE  
AND SAFETY OF PEKANBARU CITY IN ERADIZING FIRE***

***ABSTRACT***

***RAHMAT HIDAYAT***

*Keywords: Evaluation, Duties, Policy,*

Fire and Rescue Agency is an element of the implementation of the Regional Government in the field of fire prevention to carry out the tasks that have been given in tackling Fire. Therefore, in the implementation of the task of Fire and Rescue Agency Pekanbaru City by optimizing its task through, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, Accuracy. Because in the implementation of a good task will be realized good performance results included in the progress of the implementation of fire fighting in Pekanbaru City. The purpose of this study is to analyze the implementation of Fire and Rescue Service Office of Pekanbaru City in Tackling Fire and to know the obstacles in the implementation of Fire and Rescue Service Office of Pekanbaru City in Tackling Fire. The results of this study are expected to give the following benefits: the contribution of the mind in order to develop science, especially in the field of social and political sciences as well as reference to improve the Tasks of Fire and Rescue Agency Pekanbaru City in Handling Fire evenly in Pekanbaru City. The result of research that has been done by Fire and Survival Department of Pekanbaru City in Tackling Fire through six indicators is on the word gori "Pretty Implemented" with 29 respondents with percentage of 58%. However, the authors suggest to the Department of Fire and Rescue City Pekanbaru to be more able to improve its performance in providing fire prevention services evenly and improve cooperation between the leadership with subordinates and employee cooperation with the people of Pekanbaru City.

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN KOTA PEKANBARU DALAM  
MENANGGULANGI KEBAKARAN**

**ABSTRAK**

**RAHMAT HIDAYAT**

*Kata Kunci : Evaluasi, Tugas, Kebijakan,*

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan kebakaran Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan dalam Menanggulangi Kebakaran di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dengan mengoptimalkan tugasnya melalui, Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan. Karena dalam pelaksanaan tugas yang baik akan terwujud hasil kinerja yang baik termasuk dalam kemajuan pelaksanaan pemadaman kebakaran di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Kebakaran serta mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Kebakaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : sumbangan pikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu sosial dan politik serta acuan untuk meningkatkan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Kebakaran secara merata di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian yang telah terlaksana oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran melalui enam indikator berada pada kata gori "**Cukup Terlaksana**" dengan nilai 29 responden dengan persentase 58%. Namun penulis menyarankan kepada pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru agar lebih dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran secara merata serta meningkatkan kerjasama antara pimpinan dengan bawahan serta kerjasama pegawai dengan masyarakat Kota Pekanbaru.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr H Detri Karya SE., MA yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Khotami S.Sos, M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan Kelas J yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 20 Desember 2017  
Penulis,

Rahmat Hidayat  
NPM. 117310548



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
a. Tujuan Penelitian .....	13
b. Kegunaan Penelitian .....	13
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	15
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	15
2. Konsep Pemerintahan dan Pemerintahan Umum .....	16
3. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan .....	21
4. Evaluasi Kebijakan .....	26
a. Jenis-jenis evaluasi.....	28
b. Proses evaluasi .....	29
c. Fungsi evaluasi.....	30

d. Konsep evaluasi .....	31
5. Konsep Kebijakan .....	32
B. Kerangka Pikiran .....	35
C. Penelitian Terlebih Dahulu .....	35
D. Konsep Operasional .....	37
E. Operasional Variabel .....	39
F. Teknik Pengukuran .....	40
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	44
D. Teknik Penarikan Sampel .....	45
E. Jenis dan Sumber Data .....	46
1. Data Skunder .....	46
2. Data Primer .....	46
F. Teknik Pengumpulan Data .....	46
G. Teknik Analisis Data .....	47
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian .....	48
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru .....	49
B. Deskripsi Umum Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru .....	52
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	56
1. Identitas Responden .....	56
B. Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran .....	58
1. Efektivitas .....	60
2. Efisiensi .....	64

3. Kecukupan.....	68
4. Perataan .....	73
5. Responsivitas.....	78
6. Ketepatan.....	83
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran .....	91
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	97



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Rahmat Hidayat  
NPM : 117310548  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah UP/Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Desember 2017

MATERAI  
TEMPEL  
Rp100000  
6000  
Rahmat Hidayat

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut pembukaan undang-undang dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Tujuan pembentukan negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi utama Pemerintah adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah pelaksana tugas pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan sebaliknya untuk minta dilayani oleh masyarakat. Untuk itu pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakatnya sebagai bagian dari wujud pelayanan kepada masyarakat itu agar masyarakat dapat terpuaskan.

Dalam penyelenggara pemerintahan di Negara Republik Indonesia untuk mempermudahnya maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi

itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 Mengemukakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/kota merupakan urusan yang bersekala Kabupaten/Kota meliputi : Perencanaan dan pengendalian, pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertahanan, pelayanan kependudukan, dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undang.

Adapun Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha atau usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, Negara



dan pemerintah untuk menuju kearah perbaikan secara bertahap dan berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan atau penyelamat terhadap bencana lain.

Penyebab kebakaran disebabkan oleh hubungan singkat atau instalasi listrik tidak aman. Mayoritas kebakaran yang terjadi dipicu oleh hubungan pendeknya arus listrik. Razia jaringan rutin digelar, tetapi kasus kebakaran terus berulang. Selain menyiapkan perangkat pemadam. PLN juga mengimbau warga untuk mengecek kondisi kabel dan sambungan listrik secara rutin dan menggantinya jika dinilai perlu.

Permasalahan utama dalam manajemen kebakaran adalah Karena faktor kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya kebakaran, tidak adanya pengorganisasian kebakaran ditempat pemukiman atau perumahan, kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan standar keselamatan pencegahan kebakaran. Langkah-langkah penanggulangan kebakaran dilingkungan perumahan dan pemukiman telah dirumuskan dalam kepmen PU Nomor 11/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di perkotaan.

Dengan demikian semakin jelaslah bahwa menjadi kewajiban bagi pemilik/pengelolaan bangunan gedung untuk menjamin keselamatan penghuni

bangunan gedung melalui penerapan manajemen penanggulangan kebakaran terutama di Kota Pekanbaru.

Salah satu kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut adalah Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru tersebut mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota dibidang Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

Adapun tugas pokok dari Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang penanggulangan dan pencegahan kebakaran dan tugas fungsinya dari pemadam kebakaran yaitu melayani masyarakat dalam bidang perizinan/rekomendasi pengawasan bangunan dalam hal pencegahan kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Pasal 3 dimana Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum.
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, membawahi :
  1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  2. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan.

3. Seksi Inpeksi Proteksi Kebakaran.
- d. Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana, membawahi :
  1. Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi.
  2. Seksi Penanggulangan Bencana.
  3. Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan.
- e. Bidang Sarana dan Prasana, membawahi :
  1. Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik.
  2. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbengkelan.
  3. Seksi Distribusi Peralatan dan Logistik.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan penjelasan diatas Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana adalah pelaksana penanggulan kebakaran. Dimana Tugas dan fungsi Bidang Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Pasal 14 dikatakan :

- (1) Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana.
- (2) Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadamandan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, prabencana, pemberdayaan masyarakat, serta pasca bencana.
  - b. Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta

Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, prabencana pemberdayaan masyarakat, serta pasca bencana.

- c. Pelaksanaan pelaporan tentang kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, prabencana, pemberdayaan masyarakat serta pascabencana.
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik serta pascabencana.
- f. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi dari seksi penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru dimana pemadam kebakaran ikut serta dalam merumuskan dan melaksanakan pengenalan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta, tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penggunaan alat pemadam kebakaran.

Pencegahan kebakaran merupakan tahap strategis, karena dilakukan untuk mencegah agar kebakaran tidak terjadi. Dalam kenyataannya langkah ini paling sering diabaikan atau tidak mendapat perhatian oleh semua pihak. Dalam fase pencegahan ini banyak upaya yang dilakukan, misalnya menetapkan kebijakan, melakukan pelatihan rancang bangunan, membuat analisa resiko kebakaran dan prosedur keselamatan.

Kemudian terkait dengan masalah proses penanggulangannya atau pemadam kebakaran, maka salah satu faktor penentuan dalam hal suksesnya operasi penanggulangan dan pemadam kebakaran adalah *response time* (waktu tanggap) Pemadam Kebakaran dalam memadamkan kebakaran. *Response Time* ini adalah waktu terima berita dan berangkat (*dispatching time*). Waktu perjalanan (*travel time*), waktu kedatangan (*trun out time*) dan waktu pengaturan (*set up time*).

Pada waktu tempuh atau sarana dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran yaitu waktu tempuh unit pemadam kebakaran tiba dilokasi kebakaran adalah 15 menit dengan rincian :

- a. Waktu sejak diterima pemberitahuan kebakaran di suatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadam selama 5 menit.
- b. Waktu tempuh/perjalanan dari pos kebakaran menuju lokasi kebakaran selama 5 menit.
- c. Waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi pemadam (penyemprotan) selama 5 menit.

Pada kenyataannya mobil pemadam kebakaran tiba dilokasi lebih dari sasaran yang ditempuh oleh petugas pemadam kebakaran dikarenakan pemadam kebakaran jauh dari lokasi kejadian, waktu diperjalanan dan lokasi kebakaran padat penduduk sehingga petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan dalam mengatasi kebakaran dan kenyataan dilapangan dimana masih banyak keluhan masyarakat bahwa petugas pemadam kebakaran sering terlambat datang kelokasi kejadian untuk memulai operasi pemadam kebakaran sehingga pekerjaan mereka dinilai tidak professional.

Berikut dapat diketahui sarana prasarana yang digunakan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dalam penanggulangan kebakaran meliputi :

**Tabel : I. 1 Jenis Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan**

No	Jenis Sarana Penanggulangan	Jumlah
1	Mobil Pemadam Kebakaran	13 unit
2	Mesin Pompa	2 buah
3	Selang Kebakaran	40 buah
4	Baju anti panas	5 buah
5	Tabung Oksigen	6 buah
6	Racun api tepung kering	10 buah
7	Helm personil	20 buah
8	Kampak personil	24 buah
9	Sarung Tangan	8 buah
10	Hidrانت pilar	2 buah
11	Tali luncur	2 roll

*Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Tahun 2017*

Berdasarkan tabel diatas diketahui jenis sarana prasarana yang digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dalam penanggulangan kebakaran meliputi Mobil Pemadam Kebakaran 13 unit, Mesin Pompa 2 buah, Selang Kebakaran 40 buah, Baju anti panas 5 buah, Tabung Oksigen 6 buah,

Racun api tepung kering 10 buah, Kampak personil 24 buah, Sarung Tangan 8 buah, Hidrant pilar 2 buah, Tali luncur 2 roll.

Dari alat sarana yang ada beberapa alat dan sarana disebarakan lagi untuk memenuhi kebutuhan posko pemadam kebakaran yang ada di beberapa kecamatan di Kota Pekanbaru. Dan sarana prasarana tersebut sangat dibutuhkan kemampuan personil dalam menggunakan dan mengendalikan alat tersebut.

Pelaksanaan pemadam kebakaran cenderung menjadi kendala terhadap tingkat kemampuan pegawai dalam melaksanakan kerjanya sehingga mengalami keterlambatan dalam pencapaian kinerja yang optimal, hal ini sangat dipengaruhi terhadap jumlah pegawai dalam melaksanakan kerjasama serta diiringan terhadap pendidikan dan pengalaman agar seketika secara mendadak terjadinya kebakaran pegawai harus sudah siap baik pengetahuan serta pengalaman yang akan berlangsung. Adapun Jumlah pegawai Bidang Pemadam Kebakaran ssebagai berikut :

**Tabel : I. 2 Jumlah pegawai Bidang Pemadam Kebakaran Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2016**

NO	Nama	Pendidikan
1	2	3
1	M.Tarmizi	S1
2	Tengku Yusuf	S1
3	Adri sastro	S1
4	Adelia Dethavannie	S1
5	Saurmaida Sirait	S1
6	Yessi WISANDI.S.Pd	SMA
7	Tri Marethafiza	SLTA
8	Said Muhammad Abduh	SLTA
9	Deddy Zulheri	SLTA
10	Ria Hendriani	SLTA
11	Trisna Primayanti	SMA
12	Indra Santri	SLTA
13	Zulkarnaini	SMA
14	Yuhendri	SMA

1	2	3
15	Arianto yusuf	SMA
16	Edo Pratama	SMA
17	Atan Sobri	SMA
18	Lestari	SMA

*Sumber : Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, 2017*

Berdasarkan tabel diatas dimana jumlah pegawai Bidang Pemadam Kebakaran Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan pada tahun 2016 sebanyak 18 pegawai dengan tingkat pendidikan strata 1 sebanya 5 pegawai, tingkat pendidikan SMA/SLTP sebanyak 13 pegawai, hal ini sangatlah mempengaruhi tugas Bidang Pemadam Kebakaran dalam menanggulangi kebakaran karena dinilai masih banyaknya tingkat pendidikan yang rendah sehingga perlunya diberikan pembinaan serta pegetauan dalam penanggulangan kebakaran agar tercapainya tugas pemadam kebakaran yang akan dilaksanakan.

Penanggulangan kebakaran oleh Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan di Kota Pekanbaru sudah melaksanakan tugasnya secara merata dengan mengkoordinasikan personil dilapangan sampai dengan Kecamatan yang ada dikota pekanbaru. Adapun pelaksanaan Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dalam menanggulangi kebakaran di Kota Pekanbaru dapat dilihat jumlah kebakaran dan penyebab terjadinya kebakaran di Kota Pekanbaru 2013 sampai dengan 2016 dibawa ini:

**Tabel I. 3 Jumlah Angka Kebakaran Di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016**

No	Tahun	Penyebab			Jumlah
		Arus Pendek	Lilin/Kompor	Lainnya	
1	2013	52 kasus	38 kasus	45 kasus	135 kasus
2	2014	61 kasus	32 kasus	57 kasus	150 kasus
3	2015	70 kasus	34 kasus	59 kasus	163 kasus
4	2016	69 kasus	49 kasus	47 kasus	165 kasus

*Sumber : Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, 2017*



Berdasarkan tabel diatas jumlah angka kebakaran di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2015 dimana diketahui pada tahun 2013 jumlah kebakaran sebanyak 135 kasus penyebab arus pendek 52 kasus, lilin/kompor 38 kasus lainnya 45 kasus, Tahun 2014 jumlah kebakaran sebanyak 150 kasus penyebab arus pendek 61 kasus, lilin/kompor 32 kasus lainnya 57 kasus. 2015 jumlah kebakaran sebanyak 163 kasus penyebab arus pendek 70 kasus, lilin/kompor 34 kasus lainnya 59 kasus. 2016 jumlah kebakaran sebanyak 165 kasus penyebab arus pendek 69 kasus, lilin/kompor 49 kasus lainnya 47 kasus. Hal ini perlunya Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru mengoptimalkan tugasnya dengan cepat dalam menanggulangi kebakaran agar tidak terjadinya perembetan kebakaran secara luas dan kebakaran yang terjadi dapat diatasi dengan maksimal.

Berdasarkan penjelasan di atas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih lambannya Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dalam mengatasi kebakaran di Kota Pekanbaru sehingga masih banyak kebakaran yang terjadi belum teratasi dengan baik dan merata. Adapun fenomena menyangkut pelaksanaan tugas Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan meliputi :

1. Diindikasikan bahwa Efektivitas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dalam penanggulangan kebakaran belum terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat pada tabel I.2 bahwa pada tahun 2016 adalah kebakaran yang paling banyak yaitu sebanyak 165 kasus yang terdiri dari Arus Pendek sebanyak 69 kasus, Lilin/Kompor sebanyak 49 kasus dan

lainnya sebanyak 47 kasus. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat seperti pengenalan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara menyeluruh baik dalam bentuk alat pemadam kebakaran dan bentuk-bentuk penanggulangan kebakaran.

2. Belum tepatnya tindakan yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dalam mengatasi terjadinya kebakaran hal ini bahwa keterbatasan sarana prasarana sehingga tidak didukung oleh peralatan yang memadai, tentu hal tersebut menjadi kendala bagi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. Yaitu Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan hanya memiliki 13 unit mobil pemadam kebakaran untuk 12 Kecamatan dan 1 kawasan perbatasan seharusnya untuk ibu kota minimal harus memiliki 20 unit mobil pemadam kebakaran.
3. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan masih lambannya dalam penanggulangan kebakaran hal ini dirasakan masih lamanya waktu yang ditempuh pegawai pemadam kebakaran tiba dilokasi kebakaran, seharusnya waktu tanggap 5 sampai 15 menit tiba dilokasi kebakaran. Hal ini dikarenakan pos pemadam kebakaran jauh dari lokasi kejadian dan pemadam kebakaran cenderung mengisi tengki terlebih dahulu baru berangkat sehingga waktu tempuh tiba dilokasi kejadian sampai dengan 20 menit sehingga dinilai lamban dan tidak profesionalnya pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan belum optimal melaksanakan tugasnya. Hal ini sangat berbeda dengan keinginan Masyarakat yang mengharapkan adanya peningkatan kualitas tugas pemadam kebakaran. Dari permasalahan di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih jauh, dengan mengemukakan judul **“EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEKANBARU DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN”**.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pendahuluan seperti yang telah di ungkap diatas maka dari latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran ?
2. Apa Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran ?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran.

2. Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran.

**b. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan dari penelitian yang dilaksanakan antara lain:

1. Sebagai Sumber dan informasi bagi pihak terkait dalam penanggulangan kebakaran dengan permasalahan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran.
2. Bahan pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan.
3. Informasi bagi penelitian yang sejenis untuk masa yang akan datang



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. STUDI KEPUSTAKAAN

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu menurut Pramuji (dalam Syafie, 2007;13) harus ada objeknya, terminologinya yang khas, Metodologinya yang khas, filosofi yang khas dan teorinya yang khas. Sedangkan menurut Soekanto (2001;6) ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang mana selalu dapat diperiksa dan di telaah dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya.

Sedangkan Hatta (1995;14) mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya yang tampak dari luar, maupun menurut bagunannya dari dalam.

Ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai suatu objek yang memiliki kelompok prinsip, dalil, rumus yang melalui percobaan yang sistematis dilakukan berulang kali teruji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil-dalil dan rumusan mana yang dapat di pelajari. (Siagian, 1986;1). Jadi berdasarkan teori diatas dapat di definisikan bahwa ilmu pengetahuan itu kongkrit, sehingga dapat diamati, di pelajari dan diajarkan serta teruji kebenarannya, teratur, bersifat khusus dalam arti memiliki metodologi, objek.

Kemudian Braz (dalam Syafie, 2005;35) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana lembaga atau

dinas pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2007;32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Jadi ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar.

## **2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan Umum**

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk menjalankan pemerintahan secara sah berdasarkan undang-undang. Syafiie (2005;20) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang di perintah memiliki kekuatan.

Sedangkan konsep pemerintahan menurut Situmorang (1993;7) dapat diartikan sebagai badan atau lembaga para penguasa sebagai jabatan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, baik oleh setiap warga Negara maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan dan masyarakat.

Ndraha (2005;36), Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.

Pemerintah adalah gejala sosial artinya terjadi pada hubungan antara masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan individu. (Ndraha, 1997;6).

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997;13) antara lain:

1. Menjamin keamanan dari segala ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya untuk kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan disebut azas pemerintahan agar berjalan sesuai tujuan di bentuknya Negara, yaitu:

1. Azas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah.
2. Azas dekosentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah, dengan kata lain, dekonsentrasi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah
3. Tugas pembantu adalah azas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Syafhendri (2008;35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif, yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Selanjutnya Budiarjo (2003;21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dalam wilayah



suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara dengan konsep-konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Koswara, (2001:46) Pemerintahan umum adalah kegiatan petugas Pamong Praja yang dalam jabatan kepala Pemerintahan Daerah Administrasi Negara adalah wakil Pemerintah Pusat yang memegang kekuasaan sipil di daerah dan pada dasarnya bertanggung jawab sebagai kepala territorial dan sebagai wali rakyat dengan tidak mengurangi kewenangan pejabat-pejabat dinas teknis, spesialis baik militer maupun sipil. Pemerintahan Umum mencakup tugas-tugas (Gubernur, Residen) :

1. Mewakili kekuasaan dan menegakkan kewibawaan Pemerintah Pusat;
2. Menjamin keamanan dan ketertibang umum;
3. Melaksanakan kebijakan politik pemerintah pusat;
4. Menguasai lingkungan daerah hukumnya dan kekayaan alam milik Negara;
5. Memegang kendali atas penduduk;
6. Memelihara dan memajukan kemakmuran dan kesejahteraan daerah.

Urusan Pem-an Umum Periode UU. 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pasal 10 dikatakan :

- a. Tetap ditangani Pemerintah Pusat : pol LN, hankam, moneter, yustisi, agama.
- b. Urusan pemerintahan lain bersifat concurrent, dilaksanakan bersama Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota.
- c. Urusan Pemerintahan Umum menjadi UrusanWajib terkait pelayanan dasar, yang ditangani oleh Daerah baik pada Propinsi maupun Kab/Kota.

Namun jika dilihat sebagai Pemerintahan Umum dalam Arti Luas mencakup seluruh urusan pemerintahan, maka urusan pemerintahan umum semakin berkurang seiring dengan implementasi kebijakan Desentralisasi. Hal ini tidak perlu dkuatirkan atau dirisaukan mengingat negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang artinya bahwa Daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan Pemerintah Pusat di Daerah. Urusan tersebut menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Wakil yang merupakan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang merupakan sub sistem NKRI. Secara Implisit Pemerintahan Umum tertuang dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25, 26 dan 27.

Pemerintahan Umum menurut PP19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- b. Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadi Wilayah Provinsi yang bersangkutan
- c. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan
- d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- e. Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara sertamemelihara keutuhan NKRI

- f. Menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi
- g. Memelihara stabilitas politik
- h. Menjaga etika dan norma Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah
- i. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Berdasarkan penjelasan diatas dimana Pemerintahan Umum adalah seluruh urusan pemerintahan, bahwa Daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan Pemerintah Pusat di Daerah. Urusan tersebut menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Wakil yang merupakan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang merupakan sub sistem NKRI.

### **3. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di

wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. David Osborne (2004;186) Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu :

- a. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
- c. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antara pemerintahan di daerah;
- d. Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
- e. Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
- f. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan

mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi

kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintah, dan penugasan, dan tugas pembantu juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif. Berikut akan dijabarkan lebih lanjut berkenaan dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan,

pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (PP 7/2008), meliputi:

- a. Pelimpahan urusan pemerintahan;
- b. Tata cara pelimpahan;
- c. Tata cara penyelenggaraan; dan
- d. Tata cara penarikan pelimpahan.

Pengelolaan dana dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Prinsip pendanaan;
- 2) Perencanaan dan penganggaran;
- 3) Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- 4) Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Penyelenggaraan dekonsentrasi; dan
- b. Pengelolaan dana dekonsentrasi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Penugasan urusan pemerintahan;
- 2) Tata cara penugasan;
- 3) Tata cara penyelenggaraan; dan
- 4) Penghentian tugas pembantuan.

Pengelolaan dana tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Prinsip pendanaan;

- b. Perencanaan dan penganggaran;
- c. Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- d. Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 Dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi:

- a. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- b. Pengelolaan dana tugas pembantuan.

Pelimpahan Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan Pasal 11 PP 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi: (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur. (2) Selain dilimpahkan kepada Gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada: (a) instansi vertikal; (b) pejabat Pemerintah di daerah. Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi.

#### **4. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.



Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Jones evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi.

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar sosial.

Hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan di implementasikan.

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Wahad (2002;102) menjelaskan sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Sosial masukan
2. Sosial keluaran
3. Sosial hasil

#### a. Jenis-jenis Evaluasi

Jika dilihat dari pentahapannya, Wahab (2004;3) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Evaluasi tahap perencanaan  
Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.
2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan  
Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk mentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.
3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan  
Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakan letak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

#### b. Proses Evaluasi

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidak jelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, Dunn (2000;8) antara lain :

1. Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus di dasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

### c. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan Wahad, (2004;51), yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri (William N Dunn, 2000;8) yaitu :

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.
2. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

#### d. Konsep Evaluasi

Ndraha mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu, menurut mereka dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dari pada sesuatu. Evaluasi diketahui merupakan suatu proses yang mendasarkan dari pada disiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggara pelayanan pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya :

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai
2. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan.
3. Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan dan visi, misi sasaran jangka panjang.

Ndraha (2005;102) juga mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku, tretment) tolak ukur adalah before
2. Model kelompok das *solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.

3. Model kelompok kontrol kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberiperlakukan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Berdasarkan teori di atas mengenai evaluasi di sini penulis menggunakan (Dunn, 2000;608) yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari sebelumnya yang mengandung ciri, Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan.

## 5. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya Negara dapat tercapai.

Menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011;42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Menurut Dunn (2000;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik

dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelencaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan cristine, 2008;190)

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003;3) menyatakan bahwa *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”*. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syafiie (2005;150) menyebutkan :”Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain

yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Raksataya (dalam Islamy, 2007;17) memuat tiga elemen kebijaksanaan yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Tangkilisan (2003;6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan dengan tujuannya sebagai ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif( masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Kebijaksanaan menurut Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab 2004;3).

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

## B. Kerangka Pikiran



**Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran**



*Sumber : Modifikasi Penelitian, 2017*

### C. Penelitian Terlebih Dahulu

Zulkifly Arianto, 2013 Skripsi Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran diKecamatan Rawang Kao Kabupaten Siak Dalam Menanggulangi Kebakaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran melalui tugas bidang pemadam kebakaran dinilai belum maksimal dimana pemadam kebakaran masih mengalami keterlambatan dalam memadamkan api hal ini dikarenakan kurangnya sarana prasarana yang tersedia seperti mobil pemadam, peralatan pemadam serta kurangnya jumlah pegawai dalam penangan kebakaran sehingga harus mentunggu lama.

Satya Hadi Hogantara, 2010. Skripsi Peranan Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indra Giri Hulu dalam penanggulangan Kebakaran di Kota Rengat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak rumah penduduk yang belum diatasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran dal memadamkan api hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran dalam memadamkan kebakaran dikarenakan kurangnya jumlah personil, sarana prasarana yang memadai serta kurangnya kerjasama atasan dengan bawahan sehingga dalam melaksanakan tugasnya bila ada pemberitahuan dari masyarakat barulah Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran bersiap siaga dan tidak adanya penegasan atasan untuk lebih bersiap siap sebelum turun untu memadamkan api.

Faisal Yunan Siregar, 2012. Skripsi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran di Kota Dumai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kurangnya potensi pegawai dalam melaksanakan pemadaman kebakaran ditegah-tengah masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya pembinaan terhadap pegawai dalam melaksanakan tugasnya serta belum terciptanya kerjasam anantara pegawai baik atasan dengan bawahan serta dengan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran tidak adanya hasil yang maksimal dapat dilihat saat memadamkan kebakaran petugas cenderung datang setelah api berlangsung lama sehingga perlunya Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran lebih pekat terhadap pelaksanaan tugasnya.

#### D. Konsep Operasional

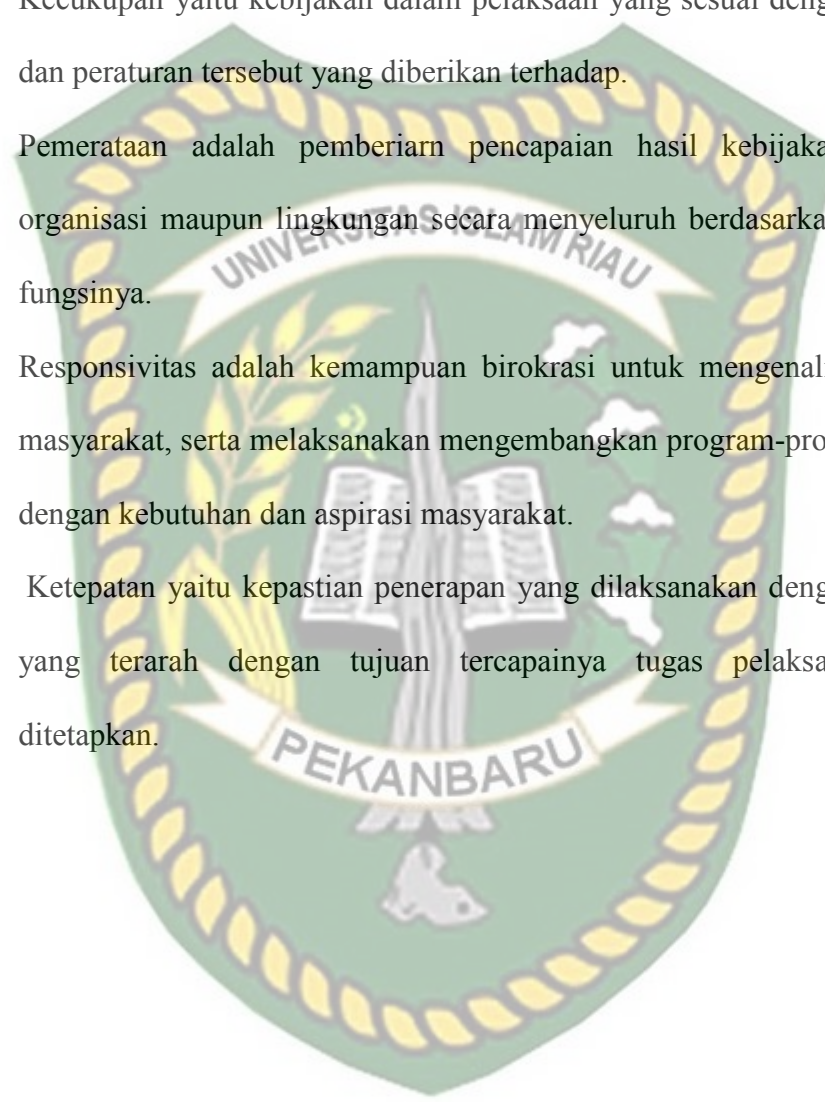
Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Kebijakan dalam penelitian ini adalah bentuk pencapaian tujuan pelaksanaan penanggulangan kebakaran yang berdasarkan peraturan yang ditetapkan yang dilaksanakan oleh Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
2. Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian dari jabatan strukturnya atau keahliannya, dengan mengidentifikasi mengenai pelaksanaan atau penerapan kebijakan ke arah yang lebih baik.
3. Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah dimana Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
4. Peraturan daerah dalam penelitian ini adalah peraturan tentang Penanggulangan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru
5. Pelaksana pemadam kebakaran adalah Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam penanggulangan pemadam kebakaran.

Adapun indikator yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

- b. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara **optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.**
- c. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan yang sesuai dengan program dan peraturan tersebut yang diberikan terhadap.
- d. Pemerataan adalah pemberiam pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluruh berdasarkan tugas dan fungsinya.
- e. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- f. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.



#### E. Operasional Variabel

**Tabel II. 1 : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai/Penilaian	Skala
1	2	3	4	5

<p>Evaluasi ialah penaksiran (<i>appraisal</i>) pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>asessment</i>), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi (Dunn, 2003 :608)</p>	Evaluasi Kebijakan	Efektivitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pemadam Kebakaran</li> <li>2. Penanggulangan Kebakaran.</li> <li>3. Sosialisasi Pemadaman</li> </ol>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup</p> <p>Terlaksana</p> <p>Kurang</p> <p>Terlaksana</p>
		Efisiensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemadaman kebakaran</li> <li>2. Penyediaan personil pemadam kebakaran.</li> </ol>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup</p> <p>Terlaksana</p> <p>Kurang</p> <p>Terlaksana</p>
		Kecukupan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama antara atasan dan bawahan.</li> <li>2. Kerjasama dengan masyarakat.</li> <li>3. Penetapan peraturan.</li> </ol>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup</p> <p>Terlaksana</p> <p>Kurang</p> <p>Terlaksana</p>
		Perataan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian kebakaran.</li> <li>2. Ketepatan waktu</li> <li>3. Pengarahan pencegahan kebakaran.</li> </ol>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup</p> <p>Terlaksana</p> <p>Kurang</p> <p>Terlaksana</p>
		Responsivitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran.</li> <li>2. Bimbingan personil pemadam kebakaran.</li> <li>3. Pelatihan personil pemadam kebakaran.</li> </ol>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup</p> <p>Terlaksana</p> <p>Kurang</p> <p>Terlaksana</p>
		1	2	3
		Ketepatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan kontak pelayanan.</li> <li>2. Melakukan pengawasan.</li> <li>3. Evaluasi tugas Pemadam</li> </ol>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p>

			Kebakaran	
--	--	--	-----------	--

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017*

### E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran diberi pengukuran dengan melakukan penilaian sebagai berikut :

Pelaksanaan Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Kebakaran dikatakan :

Terlaksana : Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentangpersentase 67%-100%

Kurang Terlaksana : Apabila semua indikator pada katagori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Cukup Terlaksana : Apabila semua indikator pada katagori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

Apun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas, dikatakan :

Terlaksana : Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentangpersentase 67%-100%

Kurang Terlaksana : Apabila semua indikator pada katagori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

2. Efisiensi dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentangpersentase 67%-100%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

3. Kecukupan dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentangpersentase 67%-100%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

4. Pemerataan dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentangpersentase 67%-100%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

## 5. Responivitas dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentangpersentase 67%-100%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

## 6. Ketepatan dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentangpersentase 67%-100%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran.

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diatas untuk disebarkan kepada populasi yang sudah ditentukan.

#### B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru yang khusus menanggulangi kebakaran. Ini semua dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam menanggulangi pencegahan kebakaran oleh Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru yang dirasa belum tepat hal ini

masih banyaknya warga yang belum merasakan realisasinya dalam pecegahan kebakaran hal ini diketahui dalam tindakan pencegahan tindakan kebakaran masih lamban dan kurangnya pegawai pelaksana dilapangan serta kurangnya mobil pemadam yang ada sampai ditempat yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.

### C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan keseluruhan subjek penelitian. Mengingat dari jumlah populasi yang tidak begitu besar dan berada dalam satu tempat maka penulis menjadikan semuanya sebagai sampel dengan menggunakan teknik sensus.

Dalam pelitian ini subyek penilitian melalui keyi nforman disebut sebagai *getekeeper*. *Gatekeeper* ini dijadikan sebagai pangkal informasi didalam melakukan penelitian dan pengumpulan informasi. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Bidang Pemadam Kebakaran, Sub Bidang Operasional, Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, dan Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dijadikan dalam penelitian. Subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.1 : Populasi Dan Sampel Penelitian Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru**

NO	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	1	1	100%
2	Kepala Sub Bidang Operasional.	1	1	100%
3	Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.	1	1	100%
4	Pegawai Bidang Pemadam Kebakaran.	18	18	100%
5	Masyarakat terkena bencana kebakaran.	165	30	12%
Jumlah		184	51	21%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2017*

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam hal ini Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Kepala Sub Bidang Operasional, Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, dan Pegawai Badan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan yang digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 18 orang.

Sedangkan terhadap Masyarakat terkena bencana kebakaran dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Yaitu Teknik penarikan sampel yang merupakan responden penelitian dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2006:62). Pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti dalam teknik penarikan responden dengan jumlah 33 orang.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi kebakaran.

### **2. Data Skunder**

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian
2. Kuisisioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana pelaksanaan

tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi kebakaran. Kuisisioner di berikan kepada responden dalam penelitian ini yaitu pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dan masyarakat terkena bencana kebakaran.

3. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan terhadap Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.
4. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah data yang di perlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut nanti nya akan di kelompokkan ke masing-masing variabel. Kemudian di analisa secara kuantitatif yang hasilnya akan di sajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan di lengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat di ambil kesimpulan nya.

## H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.2: Rincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran**

	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu ke																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X	X			X	X	X		X	X	X	X	x							
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP						X	X	X												
4	Revisi kuisisioner									X	X	X									
5	Rekomendasi survei									X				X	X						
6	Survei lapangan									X	X	X	X	X	X	X					
7	Anlisis data									X	X			X		X	X				
8	Penyusunan laporan hasil penelitian (sripsi)																X	X			
9	Konsultasi revisi skripsi													X	X	X	X				
10	Ujian konferhensif skripsi													X	X	X	X				
11	Revisi skripsi														X	X	X				
12	Pengandaan skripsi														X	X	X				

*Sumber: Olahan Data penelitian, 2016*

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang bernama Payung Sekaki. Dusun itu terletak di tepi sungai Siak (tepatnya di seberang pelabuhan yang ada saat ini).

Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (wafat tahun 1791), dusun ini berkembang dengan pesat menjadi pusat perdagangan dan merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal dari berbagai daerah. Pada saat itu pula pusat kerajaan berpindah ke seberang, sebelah selatan (sekitar pasar bawah saat ini) yang kemudian bernama Senapelan.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar dan Kampar), Negeri Senapean berganti nama menjadi Pekanbaru. Penggantian nama ini terjadi di masa Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Muazam Syah (1784 – 1801).

Pada Waktu Penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inclance Zelf Bestuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan Controluer (PHB) Pemerintah Belanda. Sewaktu pendudukan Jepang, pada tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer (GO KUNG), istilah distrik menjadi GUM yang dipimpin oleh seorang GUN CHO.

Akhirnya di zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubah status menjadi :

1. Hermene Pekanbaru dan merupakan Ibukota Keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 1 Mei 1946.
2. Kota Kecil Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1956.
3. Kotapraja berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1957.
4. Ibukota Provinsi Riau setelah dipindahkan dari Tanjung Pinang pada tahun 1959.
5. Kotamadya berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1974.
6. Kota berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Kota Pekanbaru dengan slogan “ Kota Bertuah “ yang merupakan akronim dari : Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman dan Harmonis merupakan semangat masyarakat Pekanbaru untuk membangun kotanya.

#### **A. Kondisi Geografis**

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota Pekanbaru merupakan wilayah yang sangat strategis dan berada pada simpul segitiga pertumbuhan, yaitu Indonesia-Malaysia-Singapura. Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi. Oleh karena itu, Pekanbaru merupakan pintu gerbang bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, Pekanbaru juga merupakan jalur alternatif bagi wisatawan yang hendak menuju provinsi lain atau ke luar negeri.



Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota Propinsi Riau ini memiliki Luas Wilayah 632,26 Km<sup>2</sup> dan berdasarkan letak geografisnya, Kota Pekanbaru berada pada posisi 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dengan ketinggian sekitar 5 - 11 Meter dari permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C. Daerah kota Pekanbaru yang memiliki ketinggian antara 1 sampai 20 meter dengan curah hujan dalam klasifikasi sedang, yaitu antara 100 - 200 per bulan.

Secara geomorfologis, Kota Pekanbaru keadaannya relatif merupakan daerah yang datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis alluvial bercampur pasir, pada beberapa bagian disebelah utara dan barat terdiri dari jenis tanah organosol dan gambut yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat krosif untuk besi.

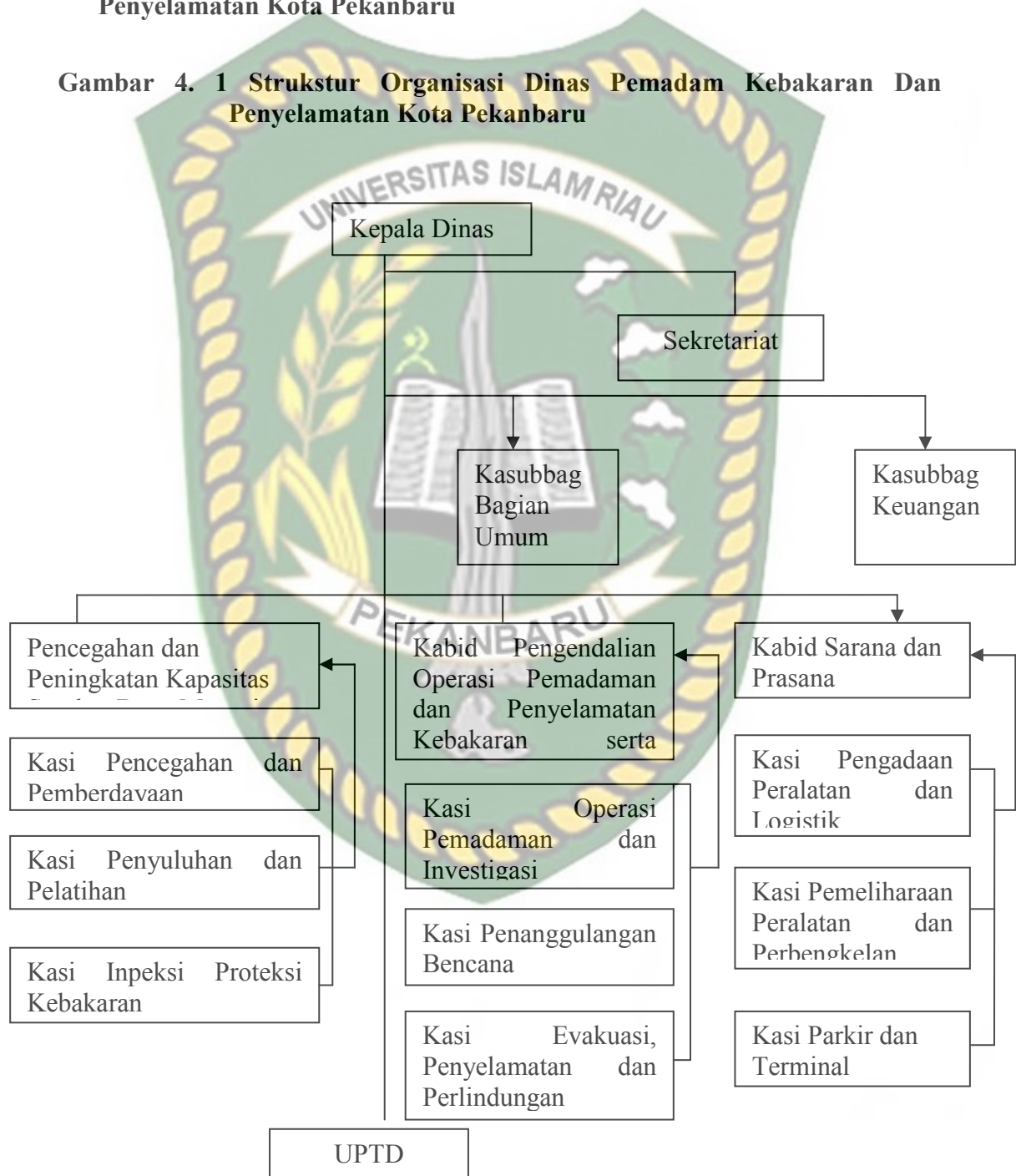
Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km<sup>2</sup> dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah administrasi bertambah menjadi 446,50 km<sup>2</sup> dan setelah pematokan ulang menjadi luas sekarang ini. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Secara geografis Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

## B. Gambaran Umum Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, 2017

## B. Deskripsi Umum Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota

### Pekanbaru

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum.
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, membawahi :
  1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  2. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan.
  3. Seksi Inpeksi Proteksi Kebakaran.
- d. Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana, membawahi :
  1. Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi.
  2. Seksi Penanggulangan Bencana.
  3. Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan.
- e. Bidang Sarana dan Prasana, membawahi :
  1. Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik.
  2. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbengkelan.
  3. Seksi Distribusi Peralatan dan Logistik.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 1. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan dan tugas pembantuan lainnya.
2. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis tentang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis tentang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas dukungan teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
  - d. pembinaan teknis, penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang tentang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
  - e. penyusunan program dan anggaran dinas.
  - f. pengelolaan keuangan dinas.
  - g. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah.
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
  - b. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
  - c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
  - d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
  - e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
  - f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- (1) Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prakebakaran serta pemberdayaan masyarakat.
  - b. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prakebakaran serta pemberdayaan masyarakat.
  - c. pelaksanaan pelaporan tentang kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prakebakaran serta pemberdayaan masyarakat.
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana

- (1) Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu sebagian

- tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana.
- (2) Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadamandan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, prabencana, pemberdayaan masyarakat, serta pasca bencana.
  - b. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, prabencana pemberdayaan masyarakat, serta pasca bencana.
  - c. pelaksanaan pelaporan tentang kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana.
  - d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, prabencana, pemberdayaan masyarakat serta pascabencana.
  - e. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik serta pascabencana.
  - f. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Sarana dan Prasarana**

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan sarana dan prasarana.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana.
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana.
  - c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sarana dan prasarana.
  - d. pelaksanaan pelaporan tentang kebijakan di bidang sarana dan prasarana.
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

#### A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

##### 1. Identitas Responden

Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel V.1. Klasifikasi Responden Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran Berdasarkan Jenis Kelamin.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-Laki	35	75%
2	Perempuan	15	25%
	Jumlah	50	100%

**Sumber : Data Olahan Penelitian, 2017**

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara laki-laki dengan jumlah 35 responden atau sekitar 75%, hal ini disebabkan laki-

laki adalah responden yang paling banyak berperan dalam mengikuti pelatihan keterampilan. Selanjutnya responden jenis kelamin perempuan sebanyak 15 responden hal ini diketahui perempuan adalah jumlah yang sedikit dalam mengikuti pelatihan keterampilan.

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	20	-
2	SMP	15	-
3	SMA	10	28%
4	Diploma	5	40%
5	Sarjana	-	30%
6	Pasca Sarjana	-	2%
Jumlah		50	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2016*

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SD sebanyak 20 orang, SMP sebanyak 15 orang SMA sebanyak 10 orang, Diploma 5 orang dari keseluruhan jumlah responden.

c. Berdasarkan Umur

**Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Unit Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran Berdasarkan Umur.**

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	16	30%
3	40-49 tahun	25	50%
4	≥ 50 tahun	9	20%
Jumlah		50	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2017*

## **B. Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran**

Dalam pelaksanaan tugasnya dengan memberikan pelayanan kesamaan hak serta keseimbangan hak dan kewajiban. menjelaskan terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran.

Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran yang telah terlaksana di Kota Pekanbaru dalam mengatasi kebakaran telah memberikan kontribusi yang dinilai melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dinilai dari tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi kebakaran melalui peraturan, sosialisasi, kerjasama petugas dan terhadap masyarakat. ketetapan pelaksanaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dinilai telah melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Dalam penetapan penanggulangan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru langsung ke lokasi kebakaran dan turut serta dalam memadamkan kebakaran sampai dengan api padam hal ini bertujuan agar tercapainya pemadaman kebakaran yang cepat dan tepat sehingga tidak merugikan bagi setiap masyarakat yang terkena bencana kebakaran serta Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru menetapkan waktu jangkauan sampai dengan ke lokasi kebakaran.

Namun yang menjadi permasalahan dalam pemadaman kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru masih ditetmuinya Pemadam kebakaran tidak tepat waktu dalam memadamkan kebakaran dikarenakan Pos Pemadam kebakaran hanya bertempat



satu tempat saja yang seharusnya setiap mobil pemadam kebakaran ditempatkan disetiap kecamatan sehingga tidak menunggu lama dalam menjangkau lokasi kebakaran, belum tercapaian tingkat kerjasama Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru antara petugas serta masyarakat sehingga hal ini menimbulkan komunikasi yang menghambat pencapaian tujuan sehingga memperlambat pelayanan pemadam kebakaran yang diberikan. Hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru seharusnya sudah menetapkan unit pemadam kebakaran disetiap kecamatan serta atasan memberikan pembinaan terhadap setiap petugas pemadam kebakaran agar terjalinnya kerjasama yang efektif serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat paham cara penanggulangan kebakaran dalam hal pertolongan pertama serta terjalinnya kerjasama antara petugas pemadam kebakaran dengan masyarakat hal ini bertujuan agar tercapainya tujuan yang akan dicapai dalam memadamkan kebakaran. Dari data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dan kusioner dengan responden masyarakat di Kota Pekanbaru, maka penulis akan mengajikan dan menyajikan dan menganalisis data-data tersebut dalam bentuk uraian serta gambaran mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran yang diberikan kepada masyarakat.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran yaitu :

### **1. Efektivitas**

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan terarahnya kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Efektivitas yang terlaksana yaitu :

1. Pelayanan Pemadam Kebakaran.
2. Penanggulangan Kebakaran.
3. Sosialisasi Pemadaman Kebakaran.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.3. Jawaban Responden Mengenai Indikator Efektivitas Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pelayanan Pemadam Kebakaran.	10 (20%)	34 (68%)	6 (12%)	50
2	Penanggulangan Kebakaran.	12 (24%)	30 (60%)	8 (16%)	50
3	Sosialisasi Pemadaman Kebakaran.	11 (22%)	25 (50%)	14 (28%)	50
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>89</b>	<b>28</b>	<b>150</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>11</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>22%</b>	<b>60%</b>	<b>18%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efektivitas dalam item penilaian Pelayanan Pemadam Kebakaran dimana responden penelitian pada Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran yang menjawab terlaksana sebanyak 10 responden atau 20% dengan alasan, pelayanan pemadam kebakaran yang ditetapkan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dengan memberikan layanan telpon serta pelayanan pemadaman api sampai dengan selesai. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 34 responden atau 68% dengan alasan, pelayanan pemadam kebakaran melalui telpon sampai dengan pemadaman kebakaran akan tetapi pelayanan yang diberikan belum optimal dimana masih cenderung terlambatnya sehingga pemadaman kebakaran tidak dapat diatasi dengan baik. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 12% dengan alasan, pelayanan yang diberikan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru belum terlihat baik dimana masih lambannya dalam penanggulangan kebakaran sehingga kebakaran yang terjadi selesai barulah pemadam kebaran tiba.

Kemudian untuk item penilaian Penanggulangan Kebakaran yang mana responden penelitian pada Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran yang menyatakan terlaksana berjumlah 12 responden atau 24% dengan alasan, penanggulangan kebakran sudah terlaksana mulai dari pemberitahuan terhadap Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sampai dengan

pemadaman api. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 30 responden atau 60% dengan alasan, Penanggulangan Kebakaran sudah terlaksana akan tetapi pemadam kebakaran masih terlihat lamban hal ini dikarenakan kurangnya persiapan pemadam kebakaran sebelum memadamkan api serta jauhnya letak posko pemadam kebakaran sehingga memakan waktu yang lama. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 16% dengan alasan, Penanggulangan Kebakaran belum terlihat baik dimana masih lambatnya Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sampai kelokasi kebakaran sehingga cenderung api marak dan selesai terjadinya kebakaran barulah pemadam kebaran tiba dilokasi kebakaran.

Kemudian untuk item penilaian Sosialisasi Pemadaman Kebakaran yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran yang menyatakan terlaksana sebanyak 11 responden atau 22% dengan alasan, Sosialisasi Pemadaman Kebakaran yang diberikan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru terhadap masyarakat dalam pengarahan akibat terjadinya kebakaran, pencegahan kebakaran, serta pertolongan pertama dalam penanggulangan kebakaran. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau 50% dkan hanyalah pada saat adanya kebakaran sehingga sosialisasi yang diberikan tidak mencapai sasaran hal ini dikarenakan kurangnya jumlah personil dalam memberikan arahan terhadap masyarakat. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 14 responden atau 28% dengan alasan, Sosialisasi Pemadaman Kebakaran oleh

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dinilai belum tepat sasaran dikarenakan sosialisasi yang diberikan hanyalah sewaktu terjadinya kebakaran sehingga hal ini masyarakat tidak mengetahui bagaimana pencegahan terhadap penanggulangan kebakaran secara luas.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dalam katagori cukup terlaksana, katagori cukup terlaksana dengan nilai responden 30 atau 60% dengan alasan, pelayanan penanggulangan kebakaran yang diberikan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru melalui pemberitahuan telepon sampai dengan pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dalam keterkaitan pengarahan akibat terjadinya kebakaran, pencegahan kebakaran, serta pertolongan pertama dalam penanggulangan kebakaran. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Efektivitas dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran melalui Pelayanan Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran, Sosialisasi Pemadaman Kebakaran.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Bapak Harianto dalam penanggulangan Kebakaran pada tanggal 01 Mei 2017 menjelaskan bahwa :

“...Dalam halnya efektivitas dalam pencapaian Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam penanggulangan kebakaran kami memberikan pelayanan melalui telpon agar kami tau dimana lokasi kebakaran serta kami memberikan sosialisasi bagaimana penanganan

kebakaran, akibat terjadinya kebakaran serta sampai dengan pertolongan pertama dalam pemadaman api meskipun sejauh ini kami belum memadamkan api dengan tepat waktu dikarenakan jauhnya letak lokasi kebakarantetapi kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran. Dimana efektivitas dalam pencapaian Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam penanggulangan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru memberikan pelayanan melalui telpon agar Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru tau dimana lokasi kebakaran serta Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru memberikan sosialisasi bagaimana penanganan kebakaran, akibat terjadinya kebakaran serta sampai dengan pertolongan pertama dalam pemadaman api meskipun sejauh ini kami belum memadamkan api dengan tepat waktu dikarenakan jauhnya letak lokasi kebakarantetapi kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dalam mensejahterakan anak dalam katagori Cukup Terlaksana.

## 2. Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara **optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada yang berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.** Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan

Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Efisiensi yang terlaksana yaitu :

1. Pemadaman kebakaran
2. Penyediaan personil pemadam kebakaran

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.4. Jawaban Responden Mengenai Indikator Efisiensi Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemadaman kebakaran.	15 (30%)	30 (60%)	5 (10%)	50
2	Penyediaan personil pemadam kebakaran.	10 (20%)	31 (52%)	9 (18%)	50
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>61</b>	<b>14</b>	<b>150</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>12</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>24%</b>	<b>62%</b>	<b>14%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efisiensi dalam item penilaian Penyelesaian kebakaran dimana responden penelitian pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi kebakaran menjawab terlaksana sebanyak 15 responden atau 30% dengan alasan, Pemadaman kebakaran yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru berdasarkan tugasnya dimana didalam ketentuan waktu pemadaman mulai dari posko sampai lokasi kebakaran kurang lebih

mencapai hingga 15 menit. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 30 responden atau 60% dengan alasan, pemadaman kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sudah terlaksana melalui tugas yang diembannya akan tetapi didalam ketetapan pemadam kebakaran sampai ke Lokasi kebakaran mencapai kurang lebih selama 15 menit hal ini belum tercapai dengan baik melainkan sampai dengan 20 menit dan 30 sehingga kebakaran sudah marak dan sudah habis barulah pemadam kebakaran sampai kelokasi kebakaran. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 10% dengan alasan, pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dinilai belum optimal dimana waktu ketetapan pemadam kebakaran sampai kelokasi kebakaran mencapai 15 menit melainkan hingga 20 sampai dengan 30 menit sehingga kebakaran yang terjadi sudah marak maupun sudah selesai barulah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sampai kelokasi kebakaran.

Kemudian untuk item penilaian Penyediaan personil pemadam kebakaran yang mana responden penelitian pada Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran yang menyatakan terlaksana berjumlah 10 responden atau 20% dengan alasan, Penyediaan personil pemadam kebakaran sudah berdasarkan ketentuan regu yang ditetapkan dan berdasarkan jam piket. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 31 responden atau 62% dengan alasan, Penyediaan personil pemadam kebakaran sudah ditetapkan berdasarkan jam piket



serta regu penanggulangan kebakaran berdasarkan tugasnya masing-masing. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 9 responden atau 18% dengan alasan, peraktek pelatihan yang diberikan dinilai belum optimal dikarenakan hanya terlaksana sampai dengan 6 bulan mulai dari pemberian teori praktek dan magang.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai efisiensi dalam mensejahterakan anak terhindarnya dari tindakan eksploitasi dalam katagori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 29 atau 58% dengan alasan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran belum terlihat terlaksana dengan baik dimana dalam mpemadam kebakaran masih kurangnya jumlah personil sehingga kurangnya efektifnya kinerja pemadaman dalam menanggulangi kebakaran. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Efisiensi dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran melalui Pemadaman kebakaran, Penyediaan personil pemadam kebakaran.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Bapak Harianto dalam penanggulangan Kebakaran pada tanggal 01 Mei 2017 menjelaskan bahwa :

“...Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sudah melaksanakan pemadaman kebakaran yang diasarkan tugasnya dengan menetapkan personil petugas pemadam kebakaran sesuai dengan jadwal masuk petugas meskipun dilapangan dinilai personil petugas dalam melakukan pemadaman dinilai masih kurang akan tetapi Dinas Pemadam

Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran. Dimana efektivitas dalam pencapaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sudah melaksanakan pemadaman kebakaran yang didasarkan tugasnya dengan menetapkan personil petugas pemadam kebakaran sesuai dengan jadwal masuk petugas meskipun dilapangan dinilai personil petugas dalam melakukan pemadaman dinilai masih kurang akan tetapi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dalam kata gori Cukup Terlaksana.

### **3. Kecukupan**

Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Kecukupan yang terlaksana yaitu :

1. Kerjasama antara atasan dan bawahan
2. Kerjasama dengan masyarakat.

### 3. Penetapan peraturan

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.5. Jawaban Responden Mengenai Indikator Kecukupan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kerjasama antara atasan dan bawahan	14 (28%)	30 (60%)	6 (12%)	50
2	Kerjasama dengan masyarakat	12 (24%)	30 (60%)	8 (16%)	50
3	Penetapan peraturan	15 (30%)	25 (50%)	10 (20%)	50
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>	<b>85</b>	<b>24</b>	<b>150</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>14</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>28%</b>	<b>56%</b>	<b>16%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Olahan data penelitian, 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Kecukupan dalam item penilaian Kerjasama antara pimpinan dan bawahan dimana responden penelitian pada Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran menjawab terlaksana sebanyak 14 responden atau 28% dengan alasan, Pelaksanaan pemadaman kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru melalui kerjasama antara atasan dan bawahan dalam penanganan kebakaran dengan menerapkan apa yang menjadi tugas pemadam kebakaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 30 responden atau 60% dengan alasan, Kerjasama atasan dengan

bawahan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi kebakaran melalui tugas yang telah akan tetapi dapat diketahui kerjasama yang terjalin belum melihat adanya perkembangan yang diterima dimana dalam penanggulangan kebakaran masih terlihat lambatnya sampai kelokasi kebakaran yang seharusnya atasan dapat mengkoordinasikan bawahannya agar bekerja dengan optimal. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 12% dengan alasan, kerjasama atasan dengan bawahan belum terlihat baik dimana bahwa penanganan pemadam kebakaran masih lamban sampai kelokasi kebakaran yang seharusnya atasan dapat memberikan masukan terhadap bawahan agar dapat bekerja dengan maksimal.

Kemudian untuk item penilaian Kerjasama dengan masyarakat yang mana responden penelitian pada Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran yang menyatakan terlaksana berjumlah 12 responden atau 24% dengan alasan, dalam pelaksanaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam penanggulangan kebakaran bekerja sama dengan masyarakat dalam hal konfirmasi pelayanan terhadap masyarakat apa bila terjadinya kebakaran. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 30 responden atau 60% dengan alasan, kerjasama Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dengan masyarakat sudah terjalin akan tetapi kerjasama yang terlaksana hanyalah sekedar pelayanan pemberitahuan semata melainkan tidak adanya kerjasama dalam penanganan kebakaran dalam

pertolongan pertama. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 16% dengan alasan, kerjasama yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru terhadap masyarakat belum berjalan dengan baik dalam penanggulangan kebakaran melalui pelatihan terhadap masyarakat dalam penanganan kebakaran.

Kemudian untuk item penilaian Penetapan peraturan yang mana responden penelitian pada Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran yang menyatakan terlaksana berjumlah 15 responden atau 30% dengan alasan, penetapan peraturan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugasnya dalam penanganan kebakaran berdasarkan peraturan yang ditetapkan agar terkoordinirnya tugas bidang penangan kebakaran. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau 50% dengan alasan, Peraturan pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru berdasarkan ketetapan peraturan yang bertujuan agar kinerja petugas tidak terlepas dari tugas yang akan dilaksanakan. Akan tetapi peraturan yang ditetapkan masih belum dilaksanakan dengan baik yang berdasarkan tugas pemadam kebakaran.. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 10 responden atau 20% dengan alasan, penetapan peraturan tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam penanggulangan kebakaran dinilai belum menghasilkan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dengan baik sesuai dengan ketetapan peraturan tugas pemadam kebakaran.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai kecukupan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dalam katagori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 28 atau 56% dengan alasan pelaksanaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam penanggulangan kebakaran melalui kerjasama atasan dan bawahan serta masyarakat terlihat belum terlaksana dengan baik dimana kerjasama hanyalah sekedarnya pemberitahuan tanpa adanya menghasilkan terobosan kinerja pemadam kebakaran lebih optimal dari sebelumnya sementara dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sudah berdasarkan peraturan akan tetapi masih terlihat lambannya dalam penanganan kebakaran terutama sampai dilokasi kebakaran. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Kecukupan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran melalui Kerjasama antara pimpinan dan bawahan, Kerjasama dengan masyarakat, Penetapan peraturan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Bapak Harianto dalam penanggulangan Kebakaran pada tanggal 02 Mei 2017 menjelaskan bahwa :

“...Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru melakukan bekerjasama dalam penangulangan kebakaran melalui pimpinan dengan bawahan, kerjasama dengan masyarakat, serta menetapkan peraturan dalam pelaksanaan tugas kami agar kami bekerja tidak keluar dari ketetapan yang sudah ditetapkan, hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru selalu menggerakkan

bawahan agar lebih optimal dalam penanggulangan kebakaran meskipun terkadang bawahan saya tidak secara optimal dalam bekerja tetapi itulah usaha yang kami lakukan dan kami selalu berusaha memberikan terbaik terhadap masyarakat dalam penanganan kebakaran....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dengan melakukan bekerjasama dalam penanggulangan kebakaran melalui pimpinan dengan bawahan, kerjasama dengan masyarakat, serta menetapkan peraturan dalam pelaksanaan tugas agar bekerja tidak keluar dari ketetapan yang sudah ditetapkan, hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru selalu menggerakkan bawahan agar lebih optimal dalam penangan kebakaran meskipun terkadang bawahan saya tidak secara optimal dalam bekerja tetapi itulah usaha yang lakukan dan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru selalu berusaha memberikan terbaik terhadap masyarakat dalam penanganan kebakaran.

#### 4. Perataan

Perataan adalah pemberian pencapaian hasil yang maksimal dalam kebijakan yang tercipta terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluruh berdasarkan tugas dan fungsinya. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Kebakaran. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Perataan yang yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru yaitu :

1. Penyelesaian kebakaran.

2. Ketepatan waktu.
3. Himbauan pencegahan kebakaran.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Perataan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penyelesaian kebakaran.	10 (20%)	34 (68%)	6 (12%)	50
2	Ketepatan waktu.	12 (24%)	30 (60%)	8 (16%)	50
3	Himbauan pencegahan kebakaran.	11 (22%)	25 (50%)	14 (28%)	50
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>	<b>89</b>	<b>28</b>	<b>150</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>11</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>22%</b>	<b>60%</b>	<b>18%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Kecukupan dalam item Penyelesaian kebakaran dimana responden penelitian pada Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran yang menjawab terlaksana sebanyak 10 responden atau 20% dengan alasan, Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dengan penyelesaian kebakaran mulai dari pemberitahuan sampai kelokasi kebakaran sampai dengan 15 menit. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup



terlaksana sebanyak 34 responden atau 68% dengan alasan, penangan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam penanggulangan kebakaran ditetapkan mulai dari pemberitahuan sampai dengan kelokasi kebakaran selama 15 menit akan tetapi pemadam kebakaran masih lamban sampai kelokasi kebakaran sehingga kebakaran enderung semakin luas dan sudah selesai barulah pemadam kebakaran sampai kelokasi kebakaran. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 12% dengan alasan, Pelaksanaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam penanggulangan kebakaran dinilai belum mencapai hasil yang optimal dimana pemadam kebakaran masih cenderung lamban sampai kelokasi kebakaran.

Kemudian untuk item penilaian Ketepatan waktu yang mana responden penelitian pada Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran yang menyatakan terlaksana berjumlah 12 responden atau 24% dengan alasan, ketetapan waktu pelaksanaan pemadam kebakaran yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dengan waktu selama 15 menit sampai kelokasi kebakaran. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 30 responden atau 60% dengan alasan, ketetapan waktu penanggulangan kebakaran mulai dari perjalan sampai kelokasi kebakaran selama 15 menit akan tetapi kenyataan masih memakan waktu sampai 30 menit hal ini dikarenakan harus mengumpulkan peralatan kebakaran serta personil. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 8

responden atau 16% dengan alasan, ketetapan waktu Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi kebakaran dinilai masih lamban hal ini dimana cenderung api sudah marak serta api sudah padam barulah pemadam kebakaran tiba dilokasi kebakaran.

Kemudian untuk item penilaian Himbauan pencegahan kebakaran yang mana responden penelitian pada Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran yang menyatakan terlaksana berjumlah 11 responden atau 22% dengan alasan, Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dengan memberikan himbauan terhadap masyarakat dalam halnya bentuk-bentuk pencegahan kebakaran. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau 50% dengan alasan, himbauan pencegahan kebakaran yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru terhadap masyarakat sudah terlaksana akan tetapi himbauan yang diberikan hanyalah dalam bentuk penanganan api semata melainkan tidak adanya praktek penanganan. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 14 responden atau 28% dengan alasan, himbauan pencegahan kebakaran yang diberikan terhadap masyarakat belum terlaksana dengan baik hal ini hanyalah diberikan himbauan sekedarnya saja dalam penanganan api melainkan tidak adanya praktek dilapangan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai peraturan dalam dalam penanggulangan kebakaran

dalam katagori cukup terlaksana, katagori cukup terlaksana dengan nilai responden 30 atau 60% dengan alasan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dimana dalam penyelesaian kebakaran masih lambatnya Pemadam Kebakaran sampai kelokasi kebakranan sehingga api sudah marak serta api sudah padam barulah pemadam kebakaran tiba ditempat serta belum adanya himbauan pencegahan kebakaran secara luas terhadap masyarakat sebagai pertolongan pertama melainkan hanya himbauan sekedarnya saja melainkan tidak adanya praktek tatacara penanggulangan kebakaran. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Perataan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran melalui Penyelesaian kebakaran, Ketepatan waktu, Himbauan pencegahan kebakaran.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Bapak Harianto dalam penanggulangan Kebakaran pada tanggal 02 Mei 2017 menjelaskan bahwa :

“...sejauh ini Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam penyelesaian kebakaran dengan ketetapan waktu sampai kelokasi kebakaran selama 15 menit meskipun sejauh ini masih terlihat lamban dikarenakan kami harus mempersiapkan dahulu keperluan yang harus dibawa agar nantinya perlengkapan sudah sedia untuk digunakan dan dalam penanganan kebakaran kami memberikan himbauan terhadap masyarakat sebagai pertolongan pertama dalam penanganan kebakaran hal ini bertujuan agar kebakaran dapat diatasi dengan bersama-sama.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam

Menanggulangi Kebakaran sejauh ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam penyelesaian kebakaran dengan ketetapan waktu sampai kelokasi kebakaran selama 15 menit meskipun sejauh ini masih terlihat lamban dikarenakan harus mempersiapkan dahulu keperluan yang harus dibawa agar nantinya perlengkapan sudah sedia untuk digunakan dan dalam penanganan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru juga memberikan himbauan terhadap masyarakat sebagai pertolongan pertama dalam penanganan kebakaran yang bertujuan agar kebakaran dapat diatasi dengan bersama-sama. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran hal ini dikatakan dalam katagori Cukup Terlaksana.

#### **5. Responsivitas**

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Responsivitas yang yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru yaitu :

1. Penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran.
2. Bimbingan personil pemadam kebakaran.
3. Pelatihan personil pemadam kebakaran.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.7. Jawaban Responden Mengenai Indikator Responsivitas Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran.	12 (24%)	32 (64%)	6 (12%)	50
2	Bimbingan personil pemadam kebakaran	15 (30%)	30 (60%)	5 (10%)	50
3	Pelatihan personil pemadam kebakaran	15 (30%)	23 (46%)	12 (24%)	50
<b>Jumlah</b>		<b>42</b>	<b>85</b>	<b>23</b>	<b>150</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>14</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>28%</b>	<b>56%</b>	<b>16%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2016*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Responsivitas dalam item penilaian Penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran dimana responden penelitian pada Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran menjawab terlaksana sebanyak 12 responden atau 24% dengan alasan, dalam penanganan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru telah menyediakan sarana prasarana mulai dari mobil pemadaman kebakaran hingga peralatan mantel, oksigen, Tangga, sampai dengan selang air. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 32 responden atau 64% dengan alasan, sarana perasarana Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kota Pekanbaru dalam penanggulangan kebakaran sudah dilengkapi akan tetapi mobil pemadam kebakaran masih dinilai kurang serta tabung oksigen serta selang yang panjang agar sampai ketitik api. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 12% dengan alasan, saranan prasarana dalam penanggulangan kebakaran dinilai belum lengkap terutama oksigen serta selang air sampai ketitik api sehingga memperlambat penangan api dengan cepat.

Kemudian untuk item penilaian Bimbingan Personil Pemadam Kebakaran yang mana responden penelitian pada Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran yang menyatakan terlaksana berjumlah 15 responden atau 30% dengan alasan, Bimbingan personil pemadam kebakaran bertujuan agar melaksanakan tugasnya dengan baik dimana bimbingan yang dilakukan disetiap minggunya pada hari senin. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau 50% dengan alasan, Bimbingan personil pemadam kebakaran sudah terlaksana disetiap minggu akan tetapi bimbingan yang diberikan hanyalah sekedaranya saja melainkan tidak adanya bimbingan secara spesifik melainkan bimbingan dalam bentuk apel pagi saja. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 23 responden atau 46% dengan alasan, Bimbingan personil pemadam kebakaran yang diberikan tidak adanya pengarahan yang tegas dalam bentuk-bentuk penaganan kebakaran melainkan hanya himbauan yang bersamaan dengan apel pagi saja.

Kemudian untuk item penilaian Pelatihan personil pemadam kebakaran yang mana responden penelitian pada Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran yang menyatakan terlaksana berjumlah 15 responden atau 30% dengan alasan, Pelatihan personil pemadam kebakaran terhadap meningkatkan tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dengan memberikan pelatihan bentuk-bentuk penagan kebakaran dengan cepat dan tepat mulai dari penyediaan peralatan sampai dengan bentuk-bentuk pemadaman api. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 30 responden atau 60% dengan alasan, pelatihan personil pemadam kebakaran sudah terlaksana akan tetapi dalam pelatihan yang diberikan tidak adanya jadwal rutin melainkan himbauan dari atasan saja yang seharusnya pelatihan harus diadakan disetiap bulannya agar personil pemadam kebakaran lebih paham dalam bentuk penanganan api. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 5 responden atau 10% dengan alasan, pelatihan personil pemadam kebakaran belum terlaksana dengan baik dalam bentuk-bentuk penangan api serta tidak adanya waktu rutin dalam pelatihan yang diberikan melainkan hanya apabila ada himbauan dari atasan saja.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Responsivitas dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dalam katagori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 28 atau 56% dengan alasan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas

Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dengan menyediakan sarana prasana dalam penagan kebakaran mulai dari mobil pemadam kebakaran, oksigen, baju mantel, dan selang air agar pelaksanaan pemadaman api dapat diatasi serta personil pemadam kebakaran diberikan bimbingan dan pelatihan yang bertujuan agar personil memahami bentuk-bentuk penangan api dengan maksimal meskipun belum adanya rutinitas waktu pelatihan dan pembinaan disetiap bulannya. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Responsivitas dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran melalui Penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran, Bimbingan personil pemadam kebakaran, Pelatihan personil pemadam kebakaran.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Bapak Harianto dalam penanggulangan Kebakaran pada tanggal 02 Mei 2017 menjelaskan bahwa :

“...sejauh ini saya sebagai pimpinan saya selalu menegaskan dalam mempersiapkan sarana prasarana dalam penanganan kebakaran terutama peralatan yang digunakan seperti oksigen, mantel api, selang air sampai dengan tangga, serta dalam meningkatkan kinerja personil saya memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap setiap personil pemadam kebakaran yang bertujuan agar personil pemadam kebakaran lebih paham bentuk-bentuk penanggulangan kebakaran meskipun belum adanya ketetapan waktu disetiap bulannya tetapi kita melakukan upaya dalam bentuk-bentuk penanggulangan kebakaran....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran sejauh ini pimpinan selalu menegaskan dalam



mempersiapkan sarana prasarana dalam penanganan kebakaran terutama peralatan yang digunakan seperti oksigen, mantel api, selang air sampai dengan tangga, serta meningkatkan kinerja personil dalam bentuk pelatihan dan pembinaan terhadap setiap personil pemadam kebakaran agar personil lebih paham bentuk-bentuk penanggulangan kebakaran. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran hal ini dikatakan dalam kata gori Cukup Terlaksana.

#### **6. Ketepatan**

Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan pencapaian tugas pelaksanaan yang ditetapkan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Ketepatan yang yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru yaitu :

1. Penyediaan kontak pelayanan.
2. Melakukan pengawasan.
3. Evaluasi tugas Pemadam Kebakaran.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dalam pemberian pelatihan keterampilan terhadap anak dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.8. Jawaban Responden Mengenai Indikator Ketepatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penyediaan kontak pelayanan.	14 (28%)	31 (62%)	5 (10%)	50
2	Melakukan pengawasan.	12 (24%)	30 (60%)	8 (16%)	50
3	Evaluasi tugas Pemadam Kebakaran.	18 (36%)	20 (43%)	12 (22%)	50
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>81</b>	<b>25</b>	<b>150</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>15</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>30%</b>	<b>54%</b>	<b>16%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2016*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Ketepatan dalam item penilaian Penyediaan kontak pelayanan dimana responden penelitian pada Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran menjawab terlaksana sebanyak 14 responden atau 28% dengan alasan, Penyediaan kontak pelayanan yang diberikan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru melalui no telpon agar masyarakat dapat menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dengan cepat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 31 responden atau 62% dengan alasan, penyediaan kontak pelayanan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sudah ada akan tetapi pada saat ditelpon Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru masih cenderung lama dalam menjawab telepon sehingga penanganan kebakaran lamban. Selanjutnya untuk

responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 10% dengan alasan, kontak pelayanan yang diberikan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru belum dapat memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat dimana saat dihubungi petugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru masih lama untuk menjawab sehingga lambannya dalam penanganan kebakaran.

Kemudian untuk item penilaian Melakukan pengawasan yang mana responden penelitian pada Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran yang menyatakan terlaksana berjumlah 12 responden atau 24% dengan alasan, pelaksanaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap dampak terjadinya kebakaran melalui pemberian himbuan terhadap masyarakat keterkaitan barang-banrang yang mudah terbakar, menjauhkan minyak dari tempat api seperti dapur masak serta penanganan kabel listrik yang tidak tersusun rapi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 30 responden atau 60% dengan alasan, Pelaksanaan pengawasan terhadap dampak terjadinya kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru melalui pemberian himbuan terhadap masyarakat keterkaitan barang-banrang yang mudah terbakar, menjauhkan minyak dari tempat api seperti dapur masak serta penanganan kabel listrik yang tidak tersusun rapi akan tetapi pengawasan belum diberikan terhadap warga secara merata sehingga warga tidak memahami secara baik bagaimana bentuk keamanan agar tidak terjadinya kebakaran. Selanjutnya responden yang

menyatakan kurang baik sebanyak 8 responden atau 16% dengan alasan, belum terlaksananya pengawasan penanganan terjadinya kebakaran hal ini dimana Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru tidak turun langsung terhadap warga atas keterkaitan dalam penanggulangan kebakaran melainkan hanya himbauan sekedarnya saja.

Kemudian untuk item penilaian Evaluasi tugas Pemadam Kebakaran yang mana Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran yang menyatakan terlaksana berjumlah 18 responden atau 36% dengan alasan, Evaluasi tugas Pemadam Kebakaran dinilai sudah terlaksana dengan melihat sejauh mana kinerja pemadam kebakaran dalam menanggulangi kebakaran. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 43% dengan alasan, Evaluasi tugas Pemadam Kebakaran dilaksanakan setelah habis penanganan kebakaran serta melihat apa yang menjadi kendala akan tetapi evaluasi dilakukan hanya apabila adanya terjadi kebakaran melainkan tidak adanya rutinitas dalam mengevaluasi apa yang menjadi kendala kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 12 responden atau 22% dengan alasan, evaluasi yang terlaksana hanya sebatas waktu setelah memadamkan kebakaran melainkan tidak adanya jadwal rutin dalam melakukan evaluasi terutama keterkaitan dalam penanganan hambatan-hambatan penanggulangan kebakaran.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Ketepatan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas

Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dalam katagori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 27 atau 54% dengan alasan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dengan menyediakan kontak pelayanan agar masyarakat dapat segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru serta melakukan pengawasan dalam bentuk memberikan himbauan keterkaitan benda yang muda menimbulkan kebakaran dan mengadakan evaluasi dalam keterkaitan penanganan kebakaran dan bentuk-bentuk penanggulangan kebakaran meskipun belum adanya ketetntuan waktu jadwal rutin yang ditetapkan. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Responsivitas dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran melalui Penyediaan kontak pelayanan, Melakukan pengawasan, Evaluasi tugas Pemadam Kebakaran.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Bapak Harianto dalam penanggulangan Kebakaran pada tanggal 03 Mei 2017 menjelaskan bahwa :

“...sejauh kami dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru kami telah menyediakan kontak pelayanan dalam menghubungi penanganan kebakaran agar penanganan kebakaran dapat diatasi dengan cepat dan melakukan pengawasan melalui himbauan terhadap masyarakat dalam keterkaitan penanganan terjadinya kebakaran serta mengadakan evaluasi keterkaitan hambatan-hambatan dalam penanganan kebakaran. Hal ini kami lakukan dengan penuh semangat meskipun masih adanya kendala-kendala dalam pelaksanaannya dikarenakan jumlah pegawai yang minim serta penanganan yang tidak cepata dikarenakan hambatan diperjalanan yang cenderung lokasi kebakaran jauh. Tetapi kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam penanganan kebakaran....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran telah menyediakan kontak pelayanan dalam menghubungi penanganan kebakaran agar penanganan kebakaran dapat diatasi dengan cepat dan melakukan pengawasan serta mengadakan evaluasi keterkaitan hambatan-hambatan dalam penanganan kebakaran. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran, hal ini dikatakan dalam kata gori Cukup Terlaksana.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.9. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	<b>Efektivitas</b>	<b>11</b> (22%)	<b>30</b> (60%)	<b>9</b> (18%)	50
2	<b>Efisiensi</b>	<b>12</b> (24%)	<b>31</b> (58%)	<b>7</b> (18%)	50
3	<b>Kecukupan</b>	<b>14</b> (28%)	<b>28</b> (56%)	<b>8</b> (16%)	50

4	<b>Perataan</b>	<b>11</b> (22%)	<b>30</b> (60%)	<b>9</b> (18%)	50
5	<b>Responsivitas</b>	<b>14</b> (28%)	<b>28</b> (56%)	<b>8</b> (16%)	50
6	<b>Ketepatan</b>	<b>15</b> (30%)	<b>27</b> (54%)	<b>8</b> (16%)	50
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>174</b>	<b>49</b>	<b>300</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>13</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>40</b>
<b>Persentase</b>		<b>26%</b>	<b>58%</b>	<b>16%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2017*

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran untuk Efektivitas yang menjawab terlaksana 11 atau 22%, Selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana 30 atau 60%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 atau 18%.

Untuk indikator kedua yaitu Efisiensi dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru yang menjawab terlaksana 12 responden atau 24%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 29 responden atau 58%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 responden atau 18%.

Untuk indikator ketiga Kecukupan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru yang menjawab terlaksana 14 responden atau 28%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 28 responden atau 56%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 8 responden atau 16%.

Untuk indikator keempat Perataan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru yang menjawab

terlaksana 11 responden atau 22%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 30 responden atau 60%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 9 responden atau 18%.

Untuk indikator kelima Responsivitas dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru yang menjawab baik 14 responden atau 28%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 28 responden atau 56%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 8 responden atau 16%.

Untuk indikator keenam Ketepatan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru yang menjawab baik 15 responden atau 30%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 27 responden atau 54%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 8 responden atau 16%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 13 orang atau persentase 26%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 29 orang atau persentase 58%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik 8 orang atau 16%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sudah melaksanakan sebagaimana tugas yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam penanggulangan kebakaran mulai dari pelayanan penerimaan himbauan kebakaran dari masyarakat penetapan waktu kelokasi kebakaran, penyelesaian pemadaman kebakaran sampai dengan



pemberian sosialisasi terhadap masyarakat serta evaluasi keterkaitan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran hal ini bertujuan guna tercapainya pelaksanaan tugas Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran

Pelaksanaan tugas Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dapat dikatakan cukup terlaksana, yang didapatkan dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata 29 atau persentase 58%, dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34%-65% maka Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran dalam katagori cukup terlaksana.

### **C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran**

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran, meliputi :

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kebakaran melalui Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran, dengan menetapkan tujuan pencapaian yang terarah dalam penanggulangan kebakaran melalui penetapan tugas, pencapaian kegiatan dan hasil kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan individu yang dimiliki. Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran

dinilai masih kurangnya jumlah pegawai dalam penanggulangan kebakaran mulai pelayanan penerimaan himbauan pemadaman, waktu penanggulangan kebakaran, sosialisasi, dan pemberian pengawasan dalam bentuk himbauan terjadinya kebakaran. Dimana penanggulangan kebakaran melalui kerjasama pimpinan dengan bawahan, kerjasama antara petugas pemadam kebakaran kerjasama dengan masyarakat terlihat belum bekerjasama dengan baik, hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru terlihat belum menggerakkan bawahan secara optimal dalam penanganan kebakaran dengan cepat sampai kelokasi kebakaran dikarenakan kurangnya jumlah pegawai akan tetapi hal dalam penanganan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru telah memberikan pengawasan himbauan terhadap masyarakat serta pembinaan dan pelatihan terhadap personil pemadam kebakaran.

Pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam penyelesaian kebakaran dengan ketetapan waktu sampai kelokasi kebakaran selama 15 menit akan tetapi sejauh ini masih terlihat lamban dikarenakan harus mempersiapkan dahulu keperluan yang harus dibawa agar nantinya perlengkapan sudah sedia untuk digunakan. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru belum mengadakan ketetapan waktu disetiap bulannya dalam pembinaan setiap personil pemadam kebakaran yang bertujuan agar personil pemadam kebakaran lebih paham bentuk-bentuk penanggulangan kebakaran. Serta Belum adanya pengawasan secara rutin melalui himbauan terhadap masyarakat dalam keterkaitan penanganan terjadinya kebakaran serta Dinas

Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru belum mengadakan evaluasi secara rutin dalam keterkaitan hambatan-hambatan dalam penanganan kebakaran.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya, telah dapat dilihat bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran. Kemudian pada bab ini akan dijelaskan dan dipaparkan kesimpulan dari penelitian ini serta saran untuk Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dapat lebih baik melaksanakan tugasnya dalam penanggulangan kebakaran di Kota Pekanbaru.

Dimana dari hasil penelitian, analisis pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran berada pada katagori Cukup Terlaksana dengan nilai rata-rata 29 atau 58% dimana rentang persentase dengan nilai 34%-66%. Dimana Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran melalui Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran belum terlaksana dengan baik dimana dinilai masih kurangnya jumlah pegawai dalam penanggulanagan kebakaran mulai pelayanan penerimaan himbauan pemadaman kebakaran, waktu pelayanan sampai ke lokasi kebakaran penyelesaian kebakaran sosialiasi, pengawasan melalui himbauan terhadap masyarakat dalam mengatasi terjadinya

kebakaran, pembinaan dan pelatihan keterkaitan tugas personil dalam menanggulangi kebakaran serta mengadakan evaluasi terkait hambatan-hambatan dalam penanganan kebakaran.

terlihat belum bekerjasama dengan baik, dikarenakan pimpinan belum secara menyeluruh menggerakkan bawahan secara optimal dalam penanganan kebakaran hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai sehingga pelayanan pemadaman kebakaran yang diberikan terhadap masyarakat tidak terlaksana dengan baik, akan tetapi dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran telah melaksanakan penanggulangan kebakaran sesuai dengan tugasnya.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru menambah jumlah personil dalam penanggulangan kebakaran serta memberikan pembinaan dan pelatihan yang bertujuan agar personil dalam penanggulangan kebakaran memiliki modal kemampuan sesuai dengan pembinaan dan pelatihan yang telah diajarkan.
2. Perlunya lebih meningkatkan kerjasama antara petugas pemadam kebakaran, kerjasama atasan dengan bawahan serta Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dengan masyarakat serta hendaknya melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala dalam menanggulangi kebakaran agar pegawai dapat melakukan terobosan untuk meningkatkan apa yang menjadi kendala dilapangan.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO 39 TELP. - FAX. : (0761) 39399 PEKANBARU

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2017/1436

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/ONON IZIN-RISSET/3695 tanggal 3 April 2017, perihal pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : RAHMAT HIDAYAT
2. NIM : 117310548
3. Fakultas : FISIPOL UNIVERSITAS RIAU
4. Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEKANBARU DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN**
8. Lokasi Penelitian : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 3 April 2017

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU  
KABID IDEOLOGI & WAWASAN KEBANGSAAN

**H. ERDIMAN, SE, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19621205 198403 1 004

Tembusan :

Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

3. Hendaknya pengawasan dan himbauan yang rutin dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru terhadap masyarakat keterkaitan penanganan akibat terjadinya kebakaran dan penanganan kebakaran guna agar terciptanya pengetahuan masyarakat dalam bentuk-bentuk penanggulangan terjadinya kebakaran



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru:Alaf Riau.
- David Osborne, Peter Plastrik, 2004. *Lima Strategi Menuju Pemerintah Wirausaha*, Terjemahan Abdul Rosyid dan Ramelan, Jakarta.
- Budiarjo, Meriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Hatta, Muhammad. 1995. *Pengantar Kejalan Ilmu dan Pengetahuan*. Jakarta. PT. Pembangunan.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sitem Pemerintah Indonesia*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musanef. 2007. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung.Mandar.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Koswara E., 2001, *Teori Pemerintahan Umum*, Institut Ilmu Pemerintahan Press, Jakarta.
- Rasyid, M. Ryass. 1997. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etikadan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Kybernologi I dan II*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sarjono, Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.



\_\_\_\_\_. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.

\_\_\_\_\_. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. Perca.

Siagian, P. Sondang, 1986. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gunung Agung.

Situmorang, Victor M. 1993. *Hukum Administrasi pemerintahan di Daerah*. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali.

Suprihartini, Amin. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak*. Gramedia, Jakarta.

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Syafhendri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Pekanbaru. Vol I No 2 : 261-262. 2008.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.

Tangkilisan, Hesel Nogi 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta:Lukman Offset.

Wahad, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta. Bumi Aksara.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Kepmen PU Nomor 11/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di perkotaan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru